

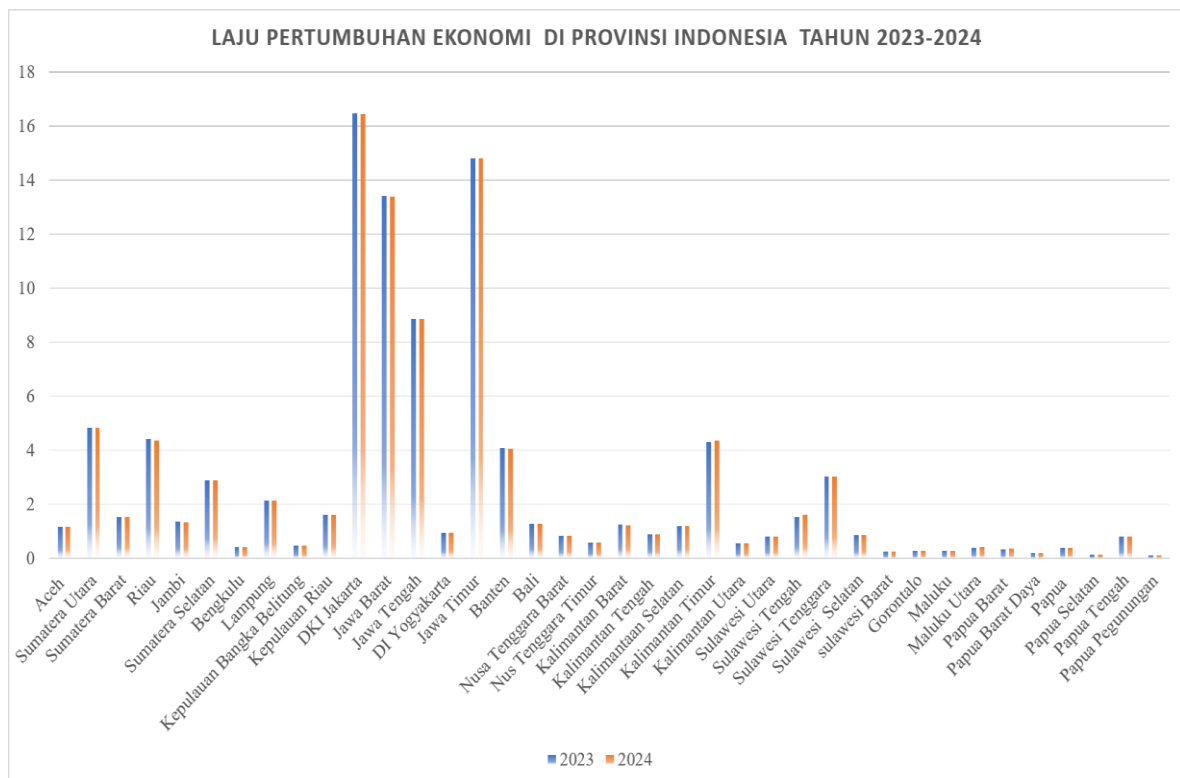
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah. Menurut Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kegiatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tercermin dalam kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam menciptakan pendapatan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi.

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang dan jasa bagi masyarakat yang didukung oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi. Sementara itu, Todaro dan Smith (2011) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi syarat penting dalam pembangunan karena berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan. Secara nasional, kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup beragam antarprovinsi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Gambar 1 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB menurut pengeluaran di Provinsi Indonesia Tahun 2023-2024 (Persen/Tahun)

Berdasarkan Gambar 1.1 Laju pertumbuhan ekonomi PDRB menurut pengeluaran provinsi di Indonesia tahun 2023–2024, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi antarprovinsi masih menunjukkan perbedaan yang cukup beragam. Beberapa provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sementara provinsi lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di setiap daerah berkembang dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antarprovinsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat investasi, kemampuan fiskal pemerintah daerah, aktivitas konsumsi masyarakat, serta struktur ekonomi yang berkembang di masing-masing daerah. Provinsi yang

memiliki investasi tinggi dan didukung oleh aktivitas ekonomi yang kuat cenderung mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang aktivitas ekonominya masih terbatas. Selain itu, pengeluaran pemerintah dan daya beli masyarakat juga berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Menurut pendekatan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibentuk oleh komponen konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta komponen pengeluaran lainnya. Dalam teori Keynes, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah merupakan komponen utama yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perubahan pada ketiga komponen tersebut akan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

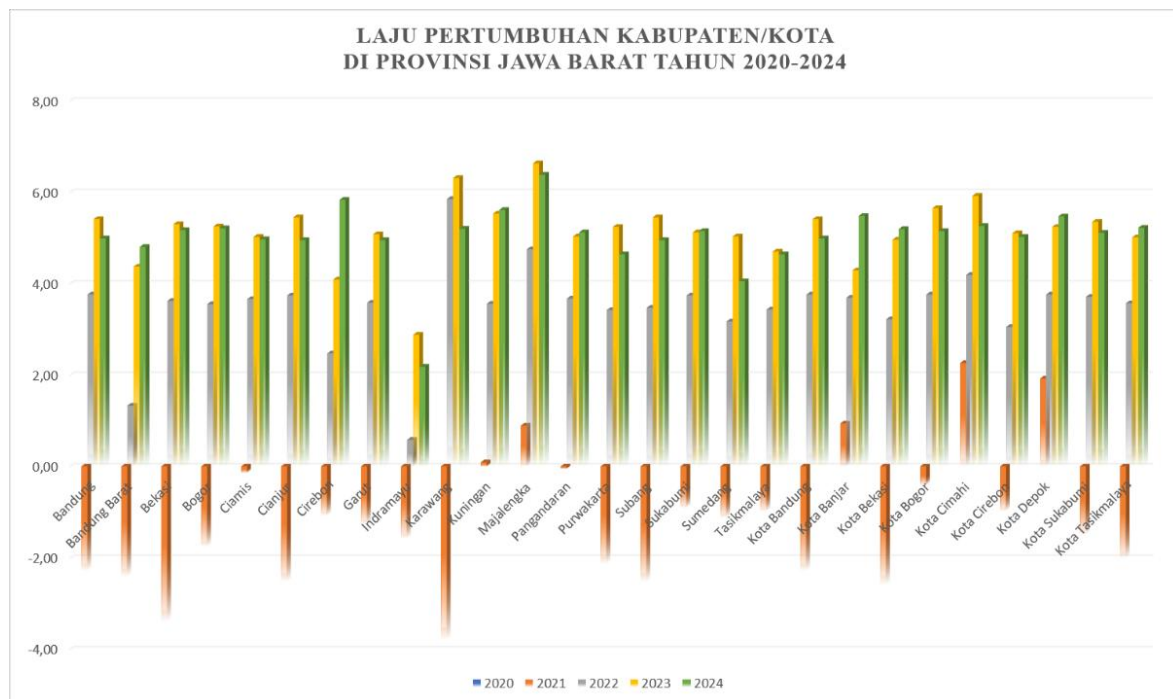
Di antara berbagai provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta menjadi salah satu pusat industri, perdagangan, dan investasi nasional. Selain itu, kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian nasional juga cukup besar, terutama dari sektor industri pengolahan yang menjadi sektor unggulan daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,00 persen dan pada tahun 2024 sebesar 4,95 persen. Meskipun tidak termasuk provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, Jawa Barat mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Stabilitas tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Barat masih mampu tumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi yang terjadi.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil pada tingkat provinsi belum tentu menggambarkan kondisi yang sama pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda, baik dari sisi kemampuan keuangan daerah, tingkat investasi, maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya variasi pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Selain itu, Jawa Barat memiliki karakteristik ekonomi yang kompleks karena terdiri dari wilayah industri maju, kawasan perkotaan, serta daerah agraris yang berkembang secara bersamaan, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta kawasan industri terbesar, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Struktur ekonomi Jawa Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta jasa. Namun demikian, di dalam Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 27 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi yang beragam, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menunjukkan pola yang tidak merata.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Gambar 1 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB/ADHK berdasarkan Pengeluaran Kab/kota di provinsi Jawa barat Tahun 2020-2024 (Persen/Tahun)

Berdasarkan Gambar 1.2 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024, terlihat bahwa kondisi perekonomian daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami kontraksi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas produksi, konsumsi, investasi, serta mobilitas masyarakat. Besarnya kontraksi yang terjadi juga berbeda antar daerah. Kabupaten Karawang tercatat mengalami kontraksi terdalam sebesar -3,80 persen, diikuti Kabupaten Bekasi sebesar -3,39 persen dan Kota Bekasi sebesar -2,58 persen. Sementara itu, terdapat beberapa daerah yang masih mampu mencatat pertumbuhan positif meskipun relatif rendah, seperti Kota Banjar sebesar 2,26 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 1,92 persen.

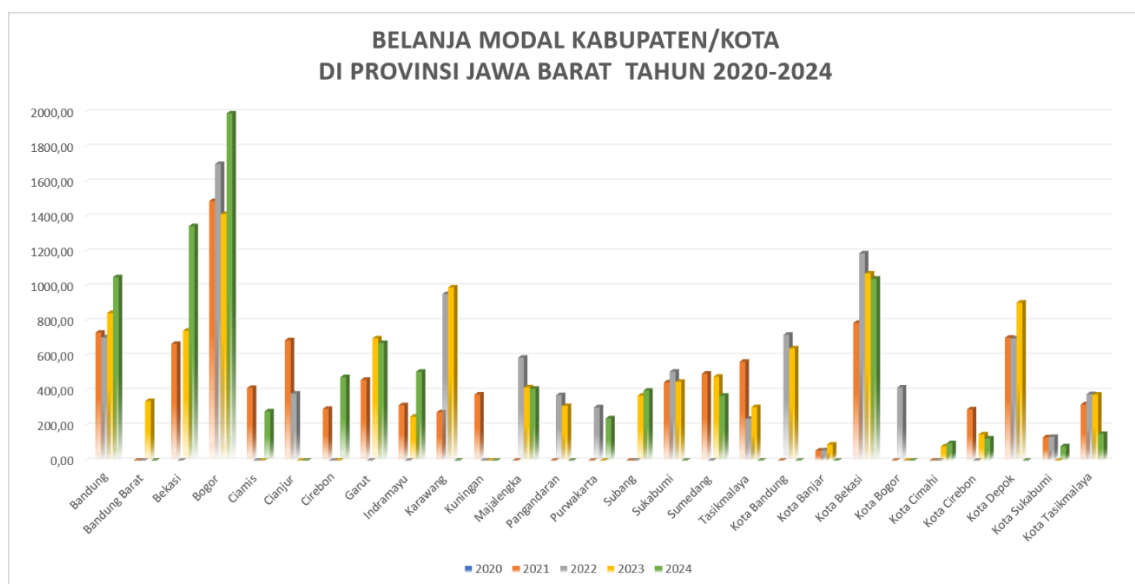
Memasuki tahun 2021, kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat kembali mencatat pertumbuhan ekonomi positif dengan kisaran pertumbuhan antara 0,58 persen hingga 5,85 persen. Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun tersebut, yaitu sebesar 5,85 persen. Pemulihan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali berjalan, baik melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, maupun aktivitas produksi di berbagai sektor ekonomi.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Sebagian besar daerah mencatat pertumbuhan di atas 5 persen, bahkan beberapa daerah mampu tumbuh lebih tinggi, seperti Kota Bekasi sebesar 6,63 persen dan Kabupaten Karawang sebesar 6,31 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi semakin kuat dan didukung oleh meningkatnya aktivitas industri, perdagangan, serta konsumsi masyarakat setelah berakhirnya berbagai pembatasan aktivitas akibat pandemi.

Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat cenderung berada pada tingkat yang lebih stabil. Sebagian besar daerah mencatat

pertumbuhan pada kisaran 4 hingga 6 persen. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan laju pertumbuhan antarwilayah. Kabupaten Indramayu misalnya, mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 9,76 persen pada tahun 2023, sementara beberapa daerah lainnya hanya tumbuh sekitar 4 persen. Pada tahun 2024, sebagian besar kabupaten/kota tetap mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif meskipun terjadi sedikit perlambatan pada beberapa wilayah.

Struktur belanja pemerintah daerah menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran guna mendorong aktivitas ekonomi daerah. Dalam penelitian ini, struktur belanja daerah difokuskan pada belanja modal dan belanja operasional. Kedua jenis belanja tersebut memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi.



Sumber Data: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kememkeu 2025)

Gambar 1 3 Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.3, belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar daerah, baik dari sisi nominal maupun perkembangannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan setiap daerah masih beragam. Secara umum, belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Beberapa daerah dengan kapasitas ekonomi yang relatif besar, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, memiliki nilai belanja modal yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, Kota Banjar, Kota Sukabumi, dan Kota Cimahi menunjukkan nilai belanja modal yang relatif lebih rendah. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya variasi kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan antarwilayah.

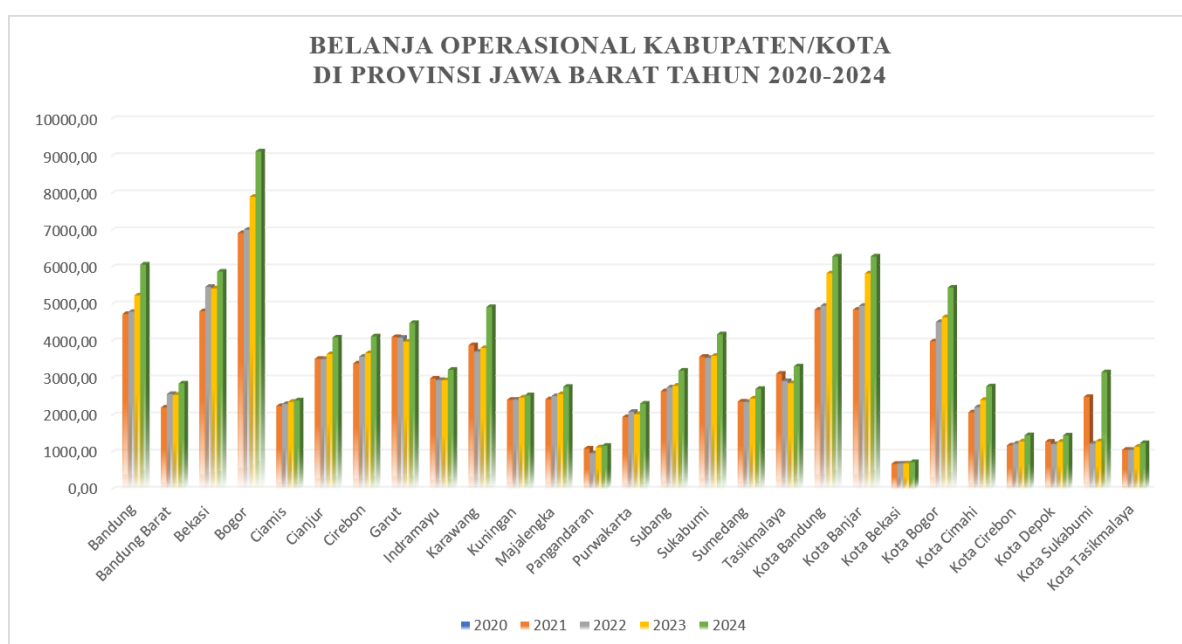
Perkembangan belanja modal juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020–2021, sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan belanja modal sebagai dampak dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran selama pandemi Covid-19. Sebagai contoh, belanja modal Kabupaten Bandung menurun dari Rp1.088,25 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp733,92 miliar pada tahun 2020, sedangkan Kota Bekasi menurun dari Rp1.104,38 miliar menjadi Rp790,05 miliar. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan prioritas anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Setelah periode pandemi, beberapa daerah mulai meningkatkan kembali belanja modalnya. Kabupaten Bandung misalnya mencapai Rp1.052,28 miliar dan Kabupaten Bekasi mencapai Rp1.344,73 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kembali menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pemulihan dan aktivitas ekonomi daerah. Namun, tingginya belanja modal tidak selalu secara

langsung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena dampaknya juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran dan ketepatan sasaran pembangunan.

Selain belanja modal, struktur APBD juga mencakup belanja operasional yang berperan dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja operasional merupakan pengeluaran daerah yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan yang manfaatnya berlangsung dalam jangka pendek. Belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.

Belanja operasional memiliki peran dalam menjaga kelancaran pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Keynes (1936), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat yang dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, belanja operasional tidak hanya berfungsi untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah, tetapi juga dapat mendukung kestabilan aktivitas ekonomi daerah melalui penyediaan pelayanan publik dan pengeluaran pemerintah.



Sumber Data: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kememkeu 2025)

Gambar 1 4 Belanja Operasional Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

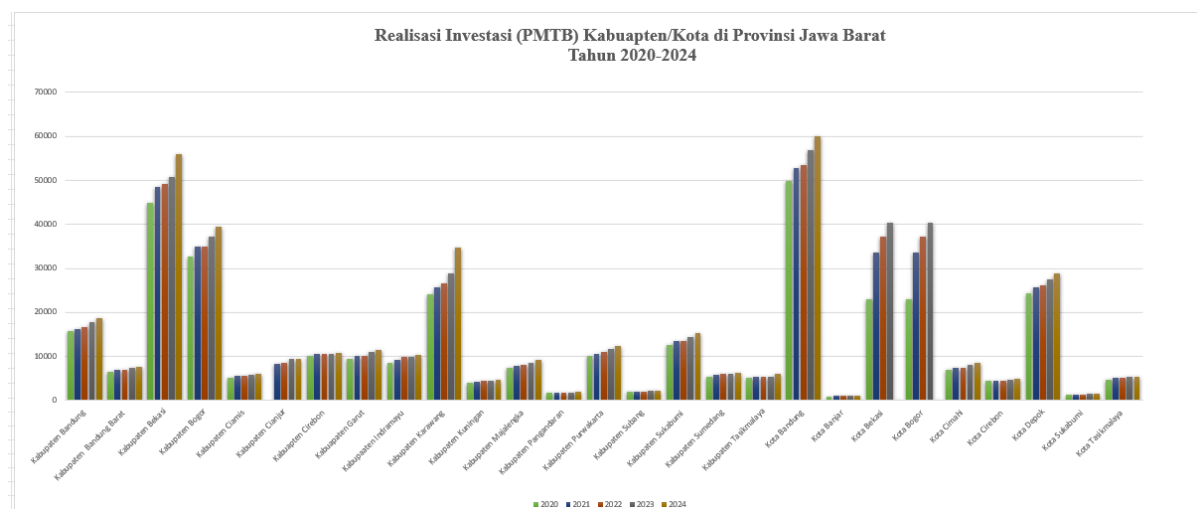
Berdasarkan Gambar 1.4. belanja operasional kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024 menunjukkan nilai yang cenderung lebih besar dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pemerintah daerah masih digunakan untuk mendukung kebutuhan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa daerah dengan jumlah penduduk dan aktivitas pemerintahan yang relatif besar, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, memiliki nilai belanja operasional yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Secara umum, belanja operasional kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan selama periode 2020–2024, meskipun terdapat beberapa daerah yang mengalami fluktuasi. Pada masa pandemi Covid-19, kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan penanganan dampak ekonomi turut memengaruhi pengeluaran operasional pemerintah daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Bekasi mencatat belanja operasional sebesar Rp5.092,70 miliar pada tahun 2020, sedangkan Kota Bekasi mencapai Rp4.646,68 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belanja operasional memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada saat terjadi tekanan ekonomi.

Dalam perspektif Keynesian, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat yang dapat digunakan untuk menjaga aktivitas perekonomian. Melalui belanja pegawai, barang dan jasa, bantuan sosial, serta pelayanan publik, pemerintah dapat mendukung daya beli masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi daerah. Namun, belanja operasional yang terlalu dominan dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada belanja yang lebih produktif. Oleh karena itu, diperlukan

pengelolaan belanja yang seimbang agar pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Selain melalui belanja modal dan belanja operasional, pertumbuhan ekonomi daerah juga berkaitan dengan aktivitas investasi. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan investasi di suatu wilayah. Dengan demikian, investasi menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi daerah.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Jawa Barat Tahun 2015-2024

Gambar 1 5 Realisasi Investasi (PMTB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.5. Realisasi investasi (PMTB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024, terlihat bahwa nilai pembentukan modal yang masuk ke masing-masing daerah menunjukkan perkembangan yang beragam dengan pola konsentrasi wilayah yang kuat.

Selama periode 2020–2024, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Bogor secara konsisten mencatatkan nilai PMTB yang sangat tinggi dan melampaui daerah lainnya. Pada tahun 2024, Kota Bandung mencatatkan realisasi PMTB tertinggi mencapai angka 60.000 miliar rupiah, disusul

Kabupaten Bekasi yang melebihi 55.000 miliar rupiah, serta Kota Bogor dan Kota Bekasi yang menyentuh rentang 40.000 miliar rupiah. Tingginya akumulasi PMTB di daerah-daerah tersebut didukung oleh ketersediaan kawasan industri terpadu, konektivitas infrastruktur yang matang, serta kedekatannya dengan pusat aktivitas ekonomi nasional.

Sebaliknya, beberapa daerah mencatatkan nilai PMTB yang relatif rendah dan cenderung stagnan selama periode 2020–2024, seperti Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, dan Kota Sukabumi, dengan nilai pembentukan modal berkisar di bawah 2.000 miliar rupiah. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi berbasis aset tetap masih terkelompok pada kawasan koridor industri dan metropolitan.

Meskipun terdapat disparitas antar-wilayah, secara umum grafik menunjukkan tren peningkatan nilai PMTB yang positif dan berkelanjutan dari tahun 2020 hingga 2024 di sebagian besar kabupaten/kota. Kenaikan secara bertahap sejak tahun 2020 membuktikan bahwa aktivitas pembentukan modal daerah mampu pulih dengan cepat pasca-guncangan pandemi.

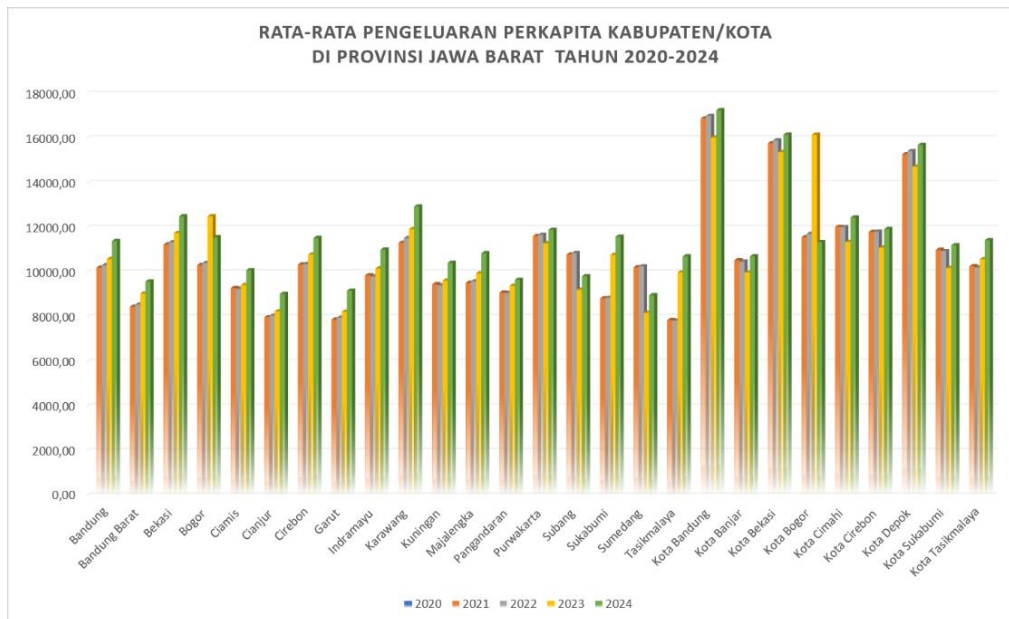
Secara teoretis, dinamika PMTB periode 2020–2024 ini memvalidasi pandangan Keynes mengenai pembentukan modal sebagai komponen permintaan agregat, serta Teori Harrod-Domar dan Teori *Take-off* Rostow. Investasi tidak hanya menyuntikkan pengeluaran jangka pendek, tetapi juga menambah stok barang modal riil (pabrik, mesin, dan infrastruktur) yang memperluas kapasitas produksi jangka panjang. Akumulasi PMTB yang terus meningkat pada wilayah-wilayah utama menjadi penggerak utama dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan efisiensi logistik, dan penciptaan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di Jawa Barat.

Hubungan antara konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi juga dijelaskan oleh Mankiw (2018) dalam peningkatan konsumsi rumah tangga akan menggeser kurva permintaan agregat ke arah kanan, sehingga tingkat output perekonomian meningkat. Artinya, semakin tinggi aktivitas konsumsi masyarakat, maka semakin besar pula dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Secara lebih spesifik, rata-rata pengeluaran per kapita digunakan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran per kapita merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan penduduk untuk konsumsi makanan maupun nonmakanan dalam periode tertentu. Pengeluaran tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan, pola konsumsi, dan daya beli masyarakat.

Selain itu, pengeluaran per kapita juga memiliki hubungan dengan pembangunan ekonomi daerah. Daerah dengan tingkat pendapatan masyarakat yang lebih tinggi umumnya memiliki tingkat konsumsi yang lebih besar. Tingginya konsumsi tersebut akan meningkatkan perputaran ekonomi, memperbesar aktivitas perdagangan, serta mendorong perkembangan sektor usaha. Oleh karena itu, rata-rata pengeluaran per kapita tidak hanya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi suatu wilayah.

Rata-rata pengeluaran per kapita menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat perkembangan ekonomi daerah. Tingginya pengeluaran masyarakat menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.



Sumber Data: *Open Data Jabar*

Gambar 1 6 Rata- rata Pengeluaran Perkapita Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Sumber Data: *Open Data Jabar*

Berdasarkan Gambar 1.6, rata-rata pengeluaran per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024 secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun pada beberapa daerah terdapat fluktuasi pada periode tertentu. Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita dapat menunjukkan adanya perubahan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Selain itu, tingkat pengeluaran per kapita juga dapat menggambarkan kondisi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah.

Perbedaan tingkat pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat di Jawa Barat masih beragam. Daerah dengan tingkat pengeluaran per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan konsumsi yang lebih besar, sedangkan daerah dengan tingkat pengeluaran yang lebih rendah menunjukkan kemampuan konsumsi masyarakat yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi penting

dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, perubahan tingkat pengeluaran masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita tidak selalu menunjukkan kondisi ekonomi yang sama pada seluruh kabupaten/kota. Perbedaan struktur ekonomi, tingkat pendapatan, harga barang dan jasa, serta karakteristik masyarakat dapat menyebabkan tingkat pengeluaran antarwilayah berbeda. Oleh karena itu, pengeluaran per kapita perlu dipertimbangkan bersama dengan faktor lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk karakteristik demografi.

Salah satu karakteristik demografi yang perlu diperhatikan adalah jumlah penduduk. Menurut Todaro dan Smith (2020), penduduk dapat menjadi salah satu sumber daya dalam pembangunan karena selain menyediakan tenaga kerja, jumlah penduduk juga dapat memperluas pasar dan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Namun, jumlah penduduk yang besar tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kesempatan kerja, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar antar kabupaten/kota. Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih besar memiliki kebutuhan pelayanan publik, konsumsi, dan aktivitas ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Perbedaan karakteristik tersebut dapat memengaruhi hubungan antara belanja pemerintah, PMTB, pengeluaran per kapita, dan pertumbuhan ekonomi.

Atas dasar tersebut, jumlah penduduk dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan karakteristik demografi antar kabupaten/kota.

Penggunaan variabel kontrol ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pengaruh belanja modal, belanja operasional, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah, investasi, serta tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan adanya perbedaan sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut, khususnya pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Syechalad, dan Majid (2016) menunjukkan bahwa investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah mampu mendorong aktivitas produksi serta meningkatkan output ekonomi.

Di sisi lain, beberapa penelitian justru menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Sanjani dan Sari (2023) mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa investasi dan pengeluaran per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Wasil (2025) juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Sementara itu, Magefiratil Aswar dkk. (2025) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa, sedangkan investasi memiliki pengaruh positif signifikan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara struktur belanja pemerintah, investasi, dan pengeluaran masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi

masih belum konsisten. Kondisi ini dapat terjadi karena setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, kemampuan fiskal, kualitas pembangunan, serta struktur sektor unggulan yang berbeda-beda. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih dilakukan pada tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan penelitian yang membahas kondisi kabupaten/kota secara lebih rinci, khususnya di Provinsi Jawa Barat, masih relatif terbatas.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat, terlihat adanya ketimpangan pertumbuhan antar daerah. Beberapa daerah mampu tumbuh cukup tinggi karena ditopang oleh sektor industri dan jasa, sedangkan daerah lainnya masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah daerah, investasi, serta tingkat kemampuan konsumsi masyarakat.

Selain itu, belanja pemerintah daerah di Jawa Barat juga terus mengalami peningkatan, baik melalui belanja modal maupun belanja operasional. Belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, belanja operasional digunakan untuk mendukung pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya. Namun demikian, peningkatan belanja daerah tersebut belum tentu memberikan dampak yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten/kota.

Fenomena ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi investasi (PMTB) yang berpusat di koridor industri (seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Kota Bandung). Meskipun belanja daerah (modal dan operasional) serta pengeluaran per kapita terus meningkat, dampaknya terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi antar-kabupaten/kota masih bervariasi.

Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat juga menjadi indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Daerah dengan tingkat pengeluaran per kapita yang tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang lebih baik dibandingkan daerah dengan tingkat pengeluaran yang rendah. Dalam teori ekonomi makro, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga perubahan tingkat pengeluaran masyarakat akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Selain itu, penelitian ini juga memasukkan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol untuk mempertimbangkan perbedaan karakteristik demografi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19 terbukti mendisrupsi aktivitas ekonomi daerah. Oleh sebab itu Dummy COVID-19 dimasukkan untuk mengontrol dampak *exogenous shock* selama periode pengamatan 2015–2024. sehingga hasil estimasi pengaruh variabel utama terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi lebih akurat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena bertujuan menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, realisasi investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024 dengan mengendalikan jumlah penduduk sebagai variabel control dan Dummy COVID- 19.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal daerah, investasi, dan tingkat konsumsi masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki unsur kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan variabel struktur belanja pemerintah daerah yang dibedakan menjadi belanja modal dan belanja operasional, kemudian dikombinasikan dengan variabel investasi dan rata-rata pengeluaran per kapita dalam satu

model penelitian. Penelitian ini juga menggunakan data panel kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024 sehingga dapat menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih rinci dan komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, pengelolaan belanja daerah, peningkatan investasi, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul:

“Pengaruh struktur belanja daerah, Realisasi Investasi, dan Rata-rata pengeluaran perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2024.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi, belanja modal, belanja operasional, realisasi investasi, rata-rata pengeluaran per kapita, dan jumlah penduduk pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2024?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal, belanja operasional, realisasi investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2024 dengan mengendalikan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi, belanja modal, belanja operasional, realisasi investasi, rata-rata pengeluaran per kapita, dan jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal, belanja operasional, realisasi investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2024 dengan mengendalikan jumlah penduduk sebagai variabel control.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap Pihak-pihak yang terkait. Adapun mannfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan praktis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan peran belanja pemerintah daerah, realisasi investasi, dan tingkat pengeluaran masyarakat.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara struktur belanja daerah, khususnya belanja modal dan belanja operasional, dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, penelitian

ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh realisasi investasi dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk sebagai faktor demografi yang dikendalikan dalam model penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan belanja daerah, peningkatan investasi, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian ekonomi regional dan ekonomi pembangunan serta menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebijakan pembangunan, investasi, dan peningkatan kesejahteraan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh belanja modal, belanja operasional, realisasi investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2024. Dalam penelitian ini, jumlah penduduk dimasukkan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh faktor demografi yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penggunaan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran bertujuan untuk menggambarkan perubahan aktivitas ekonomi riil dari waktu ke waktu tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi). Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB ADHK Menurut Pengeluaran dari tahun sebelumnya.

Belanja modal dan belanja operasional diukur berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Realisasi investasi diukur berdasarkan total realisasi Investasi PMTB sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran penduduk per kapita per tahun. Adapun jumlah penduduk diukur berdasarkan total penduduk yang berdomisili pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian.

Penelitian ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas 27 daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, hasil penelitian hanya berlaku pada wilayah penelitian dan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung untuk daerah lain di Indonesia.

Periode penelitian dibatasi pada tahun 2015–2024 untuk menggambarkan perkembangan ekonomi daerah sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini tidak memasukkan variabel lain di luar model penelitian, seperti inflasi, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maupun faktor makroekonomi lainnya, sehingga analisis difokuskan pada variabel yang telah ditetapkan dalam model penelitian.

